

## DAFTAR PUSTAKA

- Arwani, A., Ramadhan, M. N., & Restiara, V. (2020). Kepemilikan manajerial dalam agency theory. *At-Tijarah*, 7(1), 1–33. <http://repository.iainpekalongan.ac.id/id/eprint/269>
- Ayu, I., & Yunita, C. (2016). *MODAL PADA PENINGKATAN INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA* Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana Bali, Indonesia Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana Bali, Indonesia *ABSTRAK* Pembangunan manusia diartikan sebagai “ a process of enlarging people ’ s terungkap dalam publikasi United Nations Development Programme ( UNDP ) melalui Human Development Report tahun 1996 tentang Konsep Indeks Pembangunan Manusia ( IPM ). Konsep pembangunan manusia ini mengutamakan adanya empat unsur diantaranya produktivitas ( productivity ), pemerataan ( equity ), kesinambungan ( sustainability ) dan pemberdayaan ( empowerment ). IPM dilihat berdasarkan 3 faktor utama , yaitu faktor kesehatan , pendidikan dan pendapatan . IPM dapat diukur dengan menggunakan tiga indikator dasar , yaitu : usia , ilmu yang dimiliki , dan kelayakan dalam pemenuhan kebutuhan hidup . Ketiga unsur tersebut tidak dapat berdiri sendiri , akan tetapi berpengaruh satu sama lain . Badan Pusat Statistik ( BPS ) mendefinisikan bahwa IPM dinilai berdasarkan masyarakat yang memiliki pendidikan tinggi , kemampuan untuk menjaga kesehatan , mempunyai keterampilan sehingga memperoleh pendapatan yang layak untuk membiayai kebutuhannya . Menurut catatan BPS di Bali , IPM di seluruh daerah cenderung mengalami kenaikan . Berikut data yang berkaitan dengan Peningkatan IPM seluruh daerah di Provinsi Bali dari 2009 – 2013 disajikan pada Tabel 1 . Berdasarkan Tabel 1 Rata-rata tertinggi peningkatan IPM di daerah Bali adalah Kabupaten Gianyar dan Kabupaten Karangasem dengan rata-rata peningkatan yang sama besar , yaitu 0 , 60 sedangkan peningkatan IPM seluruh daerah di Provinsi Bali yang terendah adalah Kabupaten Jembrana , Badung dan Kota Denpasar sebesar 0 , 45 . 15, 2409–2438.
- Nadia, S., & Sri, R. (2018). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, dan Dana Bagi Hasil Terhadap Alokasi Belanja Modal ( Studi Empiris pada Pemerintah Kabupaten / Kota di Pulau Jawa ). *Riset Manajemen Dan Akuntansi*, 09(01), 1–16.
- Raharjo, E. (2007). Teori Agensi dan Teori Stewrship dalam Perspektif Akuntansi. *Fokus Ekonomi*, 2(1), 37–46.
- Rosadi, A. I., & Suputra, I. D. G. D. (2017). Pengaruh Kinerja Keuangan, Dana Alokasi Umum Dan SiLPA Pada Alokasi Belanja Modal. *E-Jurnal Akuntansi*, 19, 1144–1173.
- Soleh, A. (2015). Pertumbuhan Ekonomi Dan Kemiskinan Di Indonesia. *EKOMBIS REVIEW: Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Bisnis*, 2(2), 197–209. <https://doi.org/10.37676/ekombis.v2i2.15>

STEVANUS J. GOMIES, & VICTOR PATTIASINA. (2011). Analisis Kontribusi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Maluku Tenggara. *Jurnal Aset*, 13(2), 175–184.

Suwandi, K. A., & Tahar, A. (2016). PENGARUH KINERJA KEUANGAN TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI DAERAH DENGAN ALOKASI BELANJA MODAL SEBAGAI VARIABEL INTERVENING (Studi pada Pemerintah Kabupaten/Kota D.I. Yogyakarta). *InFestasi*, 11(2), 118. <https://doi.org/10.21107/infestasi.v11i2.1127>

Syahputra, R. (2017). Analisis Derajat Desentralisasi atau Kemandirian Keuangan Daerah Dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah di Aceh Tamiang. *Jurnal Samudra Ekonomika*, 1(1), 12–21.

Undang-Undang No 32 Tahun 2004, mengenai pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia

Undang-Undang No 28 Tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah

Undang-Undang No 12 Tahun 2008 tentang Pemerintah Daerah

Undang-Undang nomor 34 tahun 2000

Undang-undang nomor 18 tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah,

Wertianti, I. G. A. G. (2013). Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi Pada Belanja Modal Dengan Pad Dan Dau Sebagai Variabel Moderasi. *E-Jurnal Akuntansi*, 4(3), 567–584.

[www.bps.go.id](http://www.bps.go.id)

[www.djpk.kemenkeu.go.id](http://www.djpk.kemenkeu.go.id)